



# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
TAHUN 2025 - 2029

**PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
TAHUN 2025**



**BUPATI SERUYAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN  
NOMOR 26 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025-2029**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERUYAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - b. bahwa sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
16. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 120);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 123);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 98);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 101);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Bupati adalah Bupati Seruyan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Seruyan.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
8. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
9. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Seruyan.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Seruyan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (Lima) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Tujuan dan Sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi dasar arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.
17. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran.
18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.
19. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
20. Menteri adalah pimpinan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

21. Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya adalah Daerah otonom yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

**Pasal 2**

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari RPJMD.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

**Pasal 3**

- (1) Renstra Perangkat Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang menyusun Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. Sekretariat Daerah;
  - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. Inspektorat Daerah;
  - d. Dinas Pendidikan;
  - e. Dinas Kesehatan;
  - f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - g. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
  - h. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
  - i. Dinas Sosial;
  - j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - k. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - l. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
  - m. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - n. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- p. Dinas Perhubungan;
- q. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- r. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- t. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan;
- u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- v. Dinas Perikanan;
- w. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- x. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- y. Badan Pendapatan Daerah;
- z. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- aa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- cc. Satuan Polisi Pamong Praja;
- dd. Kecamatan Seruyan Hilir;
- ee. Kecamatan Seruyan Hilir Timur;
- ff. Kecamatan Danau Sembuluh;
- gg. Kecamatan Seruyan Raya;
- hh. Kecamatan Danau Seluluk;
- ii. Kecamatan Hanau;
- jj. Kecamatan Batu Ampar;
- kk. Kecamatan Seruyan Tengah;
- ll. Kecamatan Seruyan Hulu; dan
- mm. Kecamatan Suling Tambun.

#### **Pasal 4**

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 sekurang-kurangnya memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

#### **Pasal 5**

- (1) Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
- BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; DAN
- BAB V : PENUTUP.

- (2) Isi dan uraian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

### **BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 6**

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan setiap berakhirnya Tahun Anggaran dan setelah berakhirnya Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah sebagaimana ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan.

### **BAB IV KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 7**

Apabila dalam hal pelaksanaan RPJMD mengalami perubahan, maka Renstra Perangkat Daerah juga harus mengikuti perubahan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 19 September 2025

**BUPATI SERUYAN,**



**AHMAD SELANORWANDA**

Diundangkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 19 September 2025

**PL. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SERUYAN,**



**SAHRUN ABBAS**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025 NOMOR ...!**

26

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SERUYAN  
NOMOR 26 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025-2029

Perangkat Daerah : u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa atas perkenan dan hidayah-Nya maka dokumen “**Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025 - 2029**” ini dapat disusun sebagai pedoman dan acuan bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan untuk melaksanakan program dan kegiatannya hingga tahun 2029.

Dokumen ini merupakan hasil diskusi, ide-ide, masukan dan analisa yang telah disepakati oleh berbagai pihak yang konsen dengan arah dan tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan dalam melaksanakan prioritas program dan kegiatannya sebagai salah satu instansi pelayanan masyarakat dibidang Perpustakaan dan Kearsipan. Diharapkan dokumen ini juga dapat menjadi salah satu sumber acuan dan pedoman, serta pertimbangan dalam melakukan perencanaan dan evaluasi untuk melaksanakan upaya-upaya pengelolaan urusan Perpustakaan dan Kearsipan bagi Pemerintah Kabupaten Seruyan secara terpadu dan berkelanjutan, baik antar wilayah maupun antar sektor.

Dengan segala kerendahan hati, kami mohon masukan dan saran untuk terus dapat meningkatkan kualitas dan arah serta tujuan pengelolaan urusan Perpustakaan dan Kearsipan yang lebih baik di Kabupaten Seruyan. Kami mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak, atas segala dukungan dan partisipasinya dalam menyusun dan menyempurnakan dokumen ini.

Akhir kata semoga RENSTRA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas pada umumnya dan untuk lebih meningkatkan kualitas serta kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan pada khususnya, sehingga pembangunan di Kabupaten Seruyan dapat dilaksanakan secara optimal dan terpadu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Seruyan.

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTARTABEL.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>I 1</b>
1.1. Latar Belakang.....	I 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	I 2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I 6
1.4. Sistematika Penulisan.....	I 7
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN.....</b>	<b>II 1</b>
2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.....	II 1
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.....	II 61
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN.....</b>	<b>III 1</b>
3.1. Tujuan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025-2029.....	III 1
3.2. Sasaran Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025-2029.....	III 1
3.3. Strategi Arah Kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.....	III 3
<b>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>IV 1</b>
4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.....	IV 1
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	IV 56
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>V 1</b>

## DAFTAR TABEL

		<i>Halaman</i>
Tabel 2.1a	Jumlah Sumber Daya Manusia Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025	II 7
Tabel 2.1b	Sarana dan Prasarana yang ada pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.	II 9
Tabel 2.1c	Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023	II 14
Tabel 2.1d	Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023	II 15
Tabel 2.1e	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023	II 16
Tabel 2.2a	Pemetaan Permasalahan untuk penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	II 21
Tabel 2.2b	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat daerah	II 23
Tabel 3a	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan	III 2
Tabel 3b	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Periode Tahun 2025-2029	III 4
Tabel 3c	Penahapan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 5 Tahun Mendatang	III 5
Tabel 3d	Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan	III 6
Tabel 4.1a	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029	IV 2
Tabel 4.1b	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	IV 25
Tabel 4.1c	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	IV 49
Tabel 4.2a	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	IV 56
Tabel 4.2b	Indikator Kinerja Kunci	IV 56

## DAFTAR GAMBAR

		<i>Halaman</i>
Gambar 2.1a	Bagan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan	II 6
Gambar 2.1b	Grafik Nilai IPLM Kabupaten Seruyan Tahun 2022-2023	II 12
Gambar 2.1c	Grafik Unsur Pembanguna Literasi Masyarakat Kabupaten Seruyan Tahun 2023	II 12
Gambar 2.1d	Grafik Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023	II 13

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode jangka menengah. Renstra perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan, pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029. RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Proses Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Perangkat daerah yang diawali dengan Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah, dilanjutkan dengan Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah dan yang terakhir Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah. Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bapperida dan pemangku kepentingan. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum perangkat daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir, dan
- f. Penetapan.

Renstra Perangkat Daerah disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 01 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Tahun 2025-2029. Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025-2029 digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan. Sehingga dengan demikian di harapkan antara Renja, Renstra, dan RPJMD akan bersinergi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan yang keberhasilan pencapaiannya merupakan salah satu pendorong untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029.

## **1.2 Dasar hukum Penyusunan**

Penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) Sebagaimana Telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
  8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6042);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402)
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
16. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Srategis Dalam Penyusunan Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
  25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
  26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 120);
  27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 123);
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7

Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 98);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 101);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan dokumen Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025-2029 adalah untuk menyediakan arah kebijakan pembangunan di bidang perpustakaan dan kearsipan selama 5 (lima) tahun, yang disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029.

Disamping mempunyai maksud sebagaimana tersebut di atas, Dokumen Renstra Tahun 2025-2029 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan juga bertujuan untuk :

1. Mengidentifikasi Kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan pada periode pembangunan yang lalu.
2. Mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selama 5 (lima) tahun.
3. Menjabarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Tahun 2025-2029.
4. Menetapkan rencana program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang disertai pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun.
5. Menetapkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selama 5 (lima) tahun mendatang.
6. Menyediakan panduan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan RKA SKPD, dan

7. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 ini disusun dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

- 2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

#### **BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN**

- 3.1. Tujuan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025-2029
- 3.2. Sasaran Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025-2029
- 3.3. Strategi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- 3.4. Arah Kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

#### **BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **BAB V. PENUTUP**

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

**2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

**2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Seruyan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merencanakan, merumuskan, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kebijakan teknis di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Seruyan Nomor 59 Tahun 2022 pasal 5, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, menyelenggarakan fungsi :

1. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten;
2. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten;
3. Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten; dan
4. Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

Tugas pokok dan fungsi dari Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan berdasarkan Peraturan Bupati Seruyan 59 Tahun 2022 sebagai berikut :

**1. Kepala Dinas**

Tugas pokok Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan adalah memimpin, membina, merencanakan, mengkoordinasikan, menetapkan serta menyelenggarakan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan dibidang Perpustakaan dan Kearsipan Daerah serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan rencana kebijakan program dan kegiatan dibidang Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi dinas;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsi dinas;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan bidang Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi dinas;
- d. penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan, dan
- e. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan;

## **2. Sekretaris**

Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan mempunyai ikhtisar jabatan membantu kepala dinas dalam mengoordinasikan penyusunan perencanaan dan pelaporan, keuangan, kepegawaian, dan barang milik daerah pada Dinas serta memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di Lingkungan Dinas..

Untuk Melaksanakan tugas pokoknya, Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja Sekretariat;
- b. pengoordinasian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja dinas;
- c. pengoordinasian administrasi keuangan dinas;
- d. pengoordinasian Administrasi Barang Milik Daerah dinas;
- e. pengoordinasian Administrasi Kepegawaian dinas;
- f. pengoordinasian Administrasi Umum dinas;
- g. pengoordinasian pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan dinas;
- h. pengoordinasian penyediaan jasa penunjang urusan dinas;

- i. pengoordinasian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan dinas;
- j. pengoordinasian Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas;
- k. penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- l. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

### **3. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan**

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada subbagian penyusunan program dan keuangan;
- b. melaksanakan pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan dinas;
- c. melaksanakan pengoordinasian dan menyusun dokumen rencana kerja anggaran dan dokumen perubahan rencana kerja anggaran dinas;
- d. melaksanakan pengoordinasian dan menyusun dokumen pelaksana anggaran/ dokumen pelaksana perubahan anggaran dinas;
- e. melaksanakan pengoordinasian dan menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dinas;
- f. menyiapkan bahan evaluasi kinerja dinas;
- g. melaksanakan administrasi keuangan dinas;
- h. menilai dan mengevaluasi sasaran kinerja pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan

### **4. Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian**

Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan Administrasi Umum Dinas;
- c. melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah Dinas;
- d. melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas;
- e. melaksanakan Administrasi Kepegawaian Dinas;

- f. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

#### **5. Kepala Bidang Perpustakaan**

Kepala Bidang Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya epala Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan program kegiatan bidang perpustakaan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan Perpustakaan
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan perpustakaan;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan pembudayaan gemar membaca;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan pelestarian dan/atau pengembangan budaya etnis nusantara;
- f. penilaian dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

#### **6. Kepala Bidang Pengelolaan Arsip**

Kepala Bidang Pengelolaan Arsip mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Bidang Pengeolaan Arsip menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengelolaan arsip dinamis dan statis;
- b. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan pengelolaan arsip dinamis dan statis;
- c. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan penyerahan arsip;
- d. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan pemindahan arsip;
- e. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan pengelolaan arsip;
- f. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan retensi arsip

- g. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan akuisisi arsip; dan
- h. penilaian dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

#### **7. Kepala Bidang Perlindungan dan Autentifikasi Arsip**

Kepala Bidang Perlindungan dan Autentifikasi Arsip mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, membina, mengatur serta mengendalikan perlindungan, penyelamatan, pemusnahan arsip inaktif, autentifikasi, pencarian arsip statis dan pelayanan perijinan penggunaan arsip.

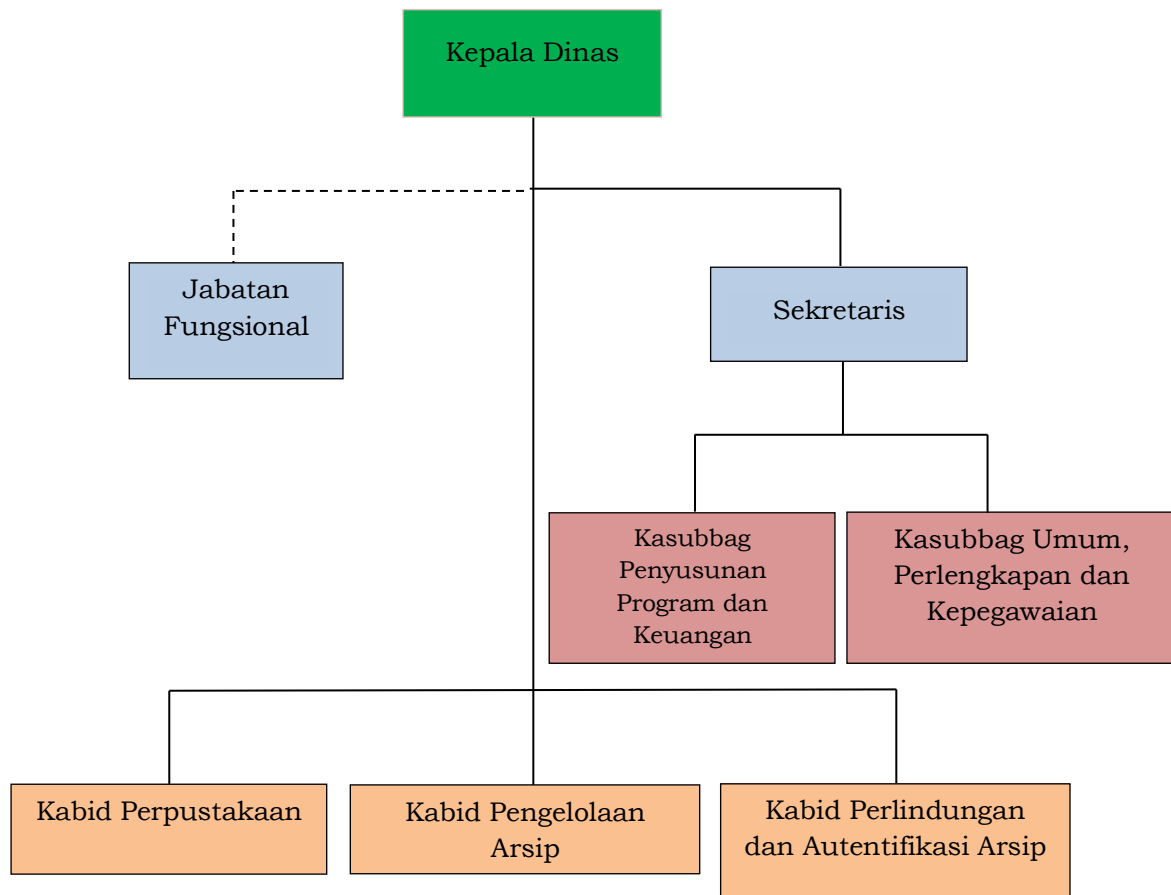
Untuk Melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Perlindungan dan Autentifikasi Arsip menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis perlindungan dan autentifikasi arsip, penyelamatan dan pemusnahan arsip inaktif perangkat daerah, autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media, pencarian arsip dan pelayanan ijin penggunaan arsip;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyelamatan dan pemusnahan arsip inaktif perangkat daerah;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pencarian arsip statis;
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan ijin penggunaan arsip;
- f. penilaian dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

#### **8. Kelompok Jabatan Fungsional**

Adapun Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan terlihat pada gambar 2.1 sebagai berikut :

**Gambar 2.1a Bagan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan**



### 2.1.2 Sumber Daya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten Seruyan dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh sumber daya – sumber daya seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana.

#### A. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan berjumlah 51 orang yang terdiri dari 21 orang ASN dan 30 Tenaga honorer.

Sumber daya Manusia di dinas perpustakaan berkedudukan ASN sebagian besar berpendidikan S1 dan untuk tenaga honorer sebagian besar berpendidikan SMA. Data tentang SDM pada dinas dapat diuraikan dengan table berikut :

**Tabel 2.1a - Jumlah Sumber Daya Manusia Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025**

<b>No</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Pangkat / Golongan</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Kepala Dinas	Pembina Utama Muda (IV/c)	S1	1 orang
2.	Sekretaris	Pembina TK.1 (IV/b)	S1	1 orang
3.	Kepala Bidang Perlindungan dan Autentifikasi Arsip	Pembina (IV/a)	S1	1 orang
4.	Kepala Bidang Pengelolaan Arsip	Pembina (IV/a)	S1	1 orang
5.	Kepala Bidang Perpustakaan	Pembina (IV/a)	S2	1 orang
6.	Arsiparis Ahli Muda	Penata Tk. I ( III/d)	S2	1 orang
7.	Arsiparis Terampil	Gol. VII	D3	1 orang
8.	Pustakawan	Penata Tk. I ( III/d)	S1	3 orang
9.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Progran dan Keuangan	Penata Tk. I ( III/d)	S2	1 orang
10.	Perencana Ahli Pertama	Gol. IX	S1	1 orang
11.	Kasubag Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian	Penata Tk. I ( III/d)	S2	1 orang
12.	Pengadministrasi	Penata	SMA	2 orang

	Perkantoran	Muda (III/a)		
		Pengatur (II/c)	SMA	2 orang
13.	Penelaah Teknis Kebijakan	Penata Muda (III/a)	S1	1 orang
14.	Pengolah Data dan Informasi	Penata Muda (III/a)	D3	1 orang
		Pengatur (II/c)	D3	2 orang
15.	Pranata Komputer Terampil	Pengatur (II/c)	D3	1 orang
		Gol. VII	D3	1 orang
<b>JUMLAH ASN</b>				<b>23 orang</b>

#### **TENAGA KONTRAK DAERAH**

No.	Jabatan	Pendidikan	Jumlah
1	Pengemudi Kendaraan Dinas Jabatan	SMA	1 orang
2	Tenaga Administrasi	S1	2 orang
		D3	2 orang
		SMA	2 orang
3	Tenaga Arsip	S1	2 orang
		SMA	6 orang
4.	Tenaga Perpustakaan	D3	2 orang
		SMA	4 orang
5.	Tenaga Jasa Kebersihan	SMA	2 orang
		SMP	1 orang
6.	Tenaga Keamanan	SMP	1 orang
		SMA	1 orang
<b>Jumlah TKD</b>			<b>26 orang</b>

Sumber : Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian Dispursip

Disamping sumber daya manusia dalam Melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan kegiatan operasional dibutuhkan juga asset/ modal sebagai sarana prasaranayang memadai. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan memiliki sebuah gedung kantor yang dilengkapi antara lain :

**Tabel 2.1b. Sarana dan Prasarana yang ada pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG
1	2	3
1	Portable Generating Set	1 Buah
2	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	1 Unit
3	Mobil Unit Perpustakaan Keliling	1 Unit
4	Sepeda Motor	7 Unit
5	Termos A.I	1 Buah
6	Rak-rak penyimpanan	48 Buah
7	Rak-rak Penyimpanan/Rak Penitipan Barang	4 Buah
8	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	1 Buah
9	Lemari Besi	3 Buah
10	Rak Kayu/Rak Buku	20 Buah
11	Rak Kayu/Rak Majalah	4 Buah
12	Filling Besi/Metal	12 Buah
13	Lemari Kaca/Kaca Kayu	3 Buah
14	Lemari Kaca	4 Buah
15	Lemari Kaca	1 Buah
16	Papan Pengumuman	2 Buah
17	White Board	2 Buah
18	Mesin Laminating	1 Buah
19	Running Text	1 Buah
20	Meja Reseption	2 Buah
21	Kursi Tamu	1 Buah
22	Kursi Putar	3 Buah
23	Kursi Lipat	53 Buah
24	Meja Komputer	1 Buah
25	Sofa	1 Buah
26	Kursi Tulis	20 Buah
27	Kursi Kerja	50 Buah
28	Gordyn	1 Buah

<b>NO.</b>	<b>NAMA BARANG</b>	<b>JUMLAH BARANG</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
29	Meja Baca	14 Buah
30	Karpet	4 Buah
31	Trolley	1 buah
32	Teralis	131 m
33	Jam Elektronik	3 Buah
34	Mesin Potong Rumput	2 Buah
33	Lemari Es	1 Buah
34	AC Unit	15 Buah
35	Kipas Angin	2 Buah
36	Kompor Gas	1 Buah
37	Alat Dapur Lainnya	1 Buah
38	Alat Dapur Lainnya	1 Buah
39	Tabung Gas	1 Buah
40	Dispenser	2 Buah
41	Rak Piring	1 Buah
42	Televisi	2 Buah
43	Sound System	2 Buah
44	Megaphone	1 Buah
45	Camera Film	1 Buah
46	Tiang Bendera	2 Buah
47	Tiang Bendera	26 Buah
48	Tangga Alumunium	1 Buah
49	Handy Cam	1 Buah
50	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1 Buah
51	P.C Unit/ Komputer PC	13 Unit
52	Lap Top	16 Unit
53	Note Book	1 Unit
54	Hard Disk	2 Buah
55	Printer	14 Buah
56	UPS	6 Unit
57	Server	1 Buah
58	Router	1 Buah
59	Switch Hub	1 Buah
60	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3 Buah
61	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	6 Buah
62	Meja Kerja 1 Biro	1 Buah
63	Meja Kerja 1/2 Biro	1 Buah

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG
1	2	3
64	Meja Kerja	9 Buah
65	Meja Kerja	19 Buah
66	Meja Kerja	1 Buah
67	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3 Buah
68	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	6 Buah
69	Proyektor + Attachment	1 Buah
70	Layar Proyektor	1 Buah
71	Camera Electronic	1 Buah
72	Lensa Kamera	1 Buah
73	Mesin Barcode	2 Buah
74	Alat Pemadam Kebakaran	2 Buah
75	Gentong Plastik	2 Buah
76	Penjepit Kertas	2 Buah
77	Penjepit Kertas	3 Buah
78	Cermin Datar dan Skala	3 Buah
79	Printer	3 Buah
80	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1 Buah

Sumber : KIR DISPURSIP

### 2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

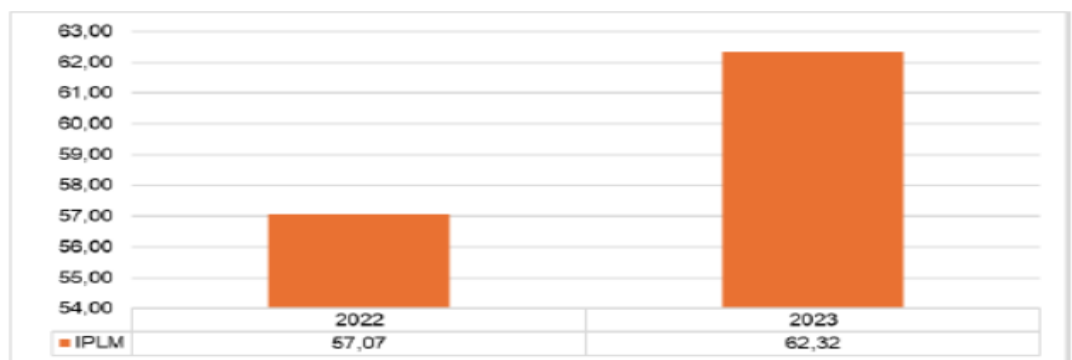
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas sumber daya manusia. Karena dengan literasi, tingkat pemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan dan informasi yang diterima menjadi lebih baik. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat.

tujuh unsur pembangunan literasi masyarakat, yaitu pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi, ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan per hari, jumlah perpustakaan ber-SNP, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosial/promosi, dan anggota perpustakaan. Perpustakaan Nasional mengelompokkan nilai IPLM menjadi 5 kategori yaitu, Sangat Rendah (0-29,9),

Rendah (30-49,9), Sedang (50-79,9), Tinggi (80-89,9), dan Sangat Tinggi (90-100).

Nilai IPLM mulai dihitung oleh Perpustakaan Nasional pada tahun 2020. Namun untuk tingkat Kabupaten/Kota baru dihitung pada tahun 2022. Pada Tahun 2022 Kabupaten Seruyan memiliki skor IPLM sebesar 57,07. Pada tahun 2023, nilai IPLM Kabupaten Seruyan naik menjadi 62,32. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Kabupaten Seruyan memiliki tingkat pembangunan literasi masyarakat yang sedang.

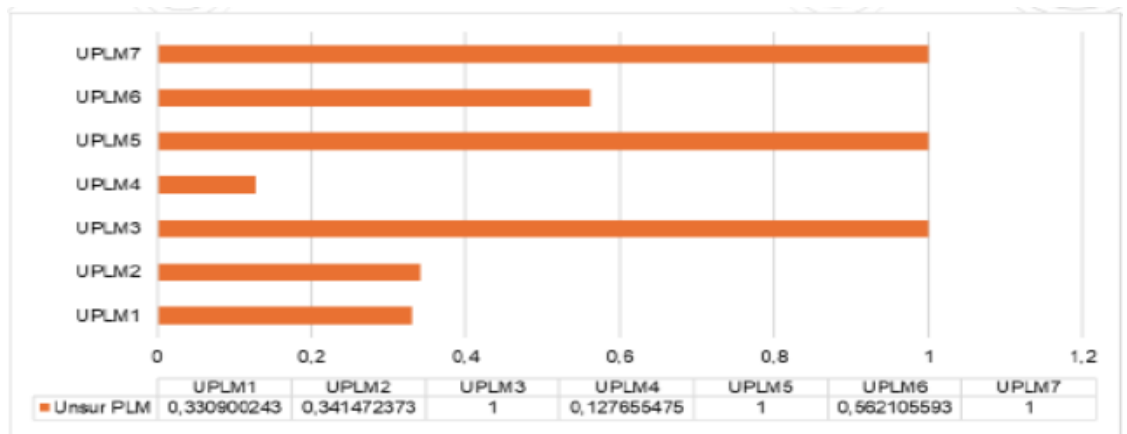
**Gambar 2.1b. Grafik Nilai IPLM Kabupaten Seruyan Tahun 2022-2023**



Sumber: Perpustakaan Nasional, 2023

Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) Kabupaten Seruyan Tahun 2023 menunjukkan besaran antara 0,127 sampai 1. Rasio UPLM terbesar terjadi pada ketercakupan tenaga perpustakaan, rasio perpustakaan ber-SNP, dan anggota perpustakaan yaitu sebesar 1. Sedangkan, nilai rasio UPLM terendah ada pada tingkat kunjungan perpustakaan per hari yaitu sebesar 0,127.

**Gambar 2.1c. Grafik Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Seruyan Tahun 2023**



Sumber: Perpustakaan Nasional, 2023

Keterangan:

UPLM 1 : Pemerataan Layanan Perpustakaan

UPLM 2 : Ketercukupan Koleksi Perpustakaan

UPLM 3 : Ketercukupan Tenaga Perpustakaan

UPLM 4 : Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari

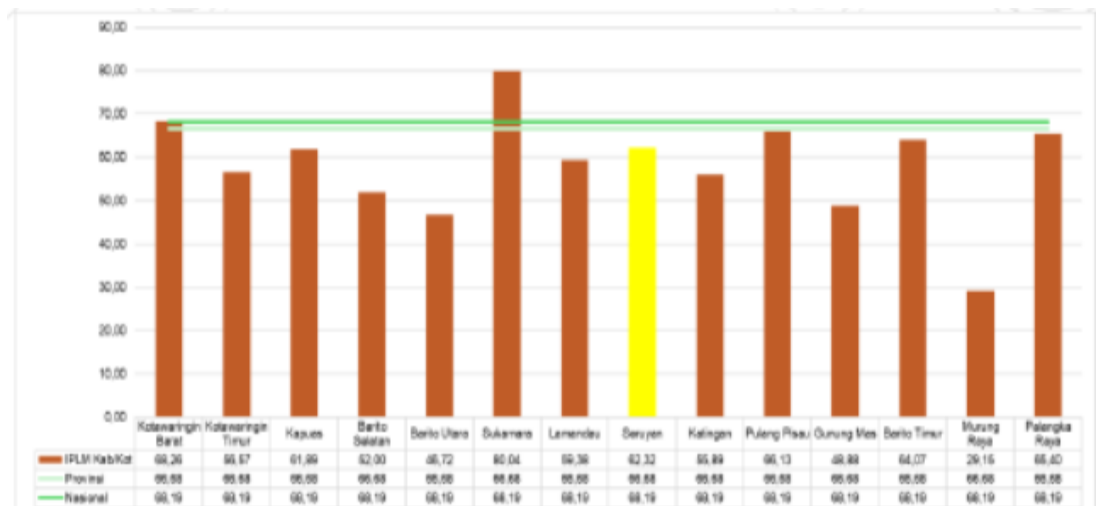
UPLM 5 : Perpustakaan ber-SNP

UPLM 6: Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi dan Promosi

UPLM 7: Anggota Perpustakaan

Apabila dibandingkan dengan nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Seruyan memiliki nilai IPLM sebesar 62,32 dan berada di peringkat 6 dari 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Peringkat pertama ditempati oleh Kabupaten Sukamara dengan nilai IPLM 80,04 dan masuk dalam kategori tinggi, hanya Kabupaten Sukamara yang nilai IPLM-nya masuk dalam kategori tinggi di Provinsi Kalimantan Tengah. Nilai IPLM kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Tengah berada di kategori sangat rendah, rendah dan sedang. Dengan Kabupaten Murung Raya yang memiliki nilai IPLM paling rendah sebesar 29,15 dan masuk dalam kategori sangat rendah.

**Gambar 2.1d. Grafik Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023**



Sumber: Perpustakaan Nasional, 2023

## Urusan Perpustakaan

Kinerja pembangunan urusan perpustakaan menurut Lampiran 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu jumlah pengunjung perpustakaan per tahun, koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah, jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun, dan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah, jumlah koleksi judul buku perpustakaan, dan jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan perpustakaan untuk Pemerintah Daerah adalah pembinaan perpustakaan, dengan lingkup pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota, pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota. Kemudian pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno yang meliputi pelestarian naskah kuno milik daerah kabupaten/kota, dan pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Seruyan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.1c. Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Seruyan Tahun 2020-2024**

Indikator Kinerja	Satuan	2020		2021		2022		2023		2024	
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K
Jumlah pengunjung pada perpustakaan umum daerah	Orang	11.567	7.855	7.900	4.929	8.500	4.929	8.165	9.385	9.000	15.533
Persentase pengunjung perpustakaan per tahun	Persen	TAD	5,98	37	3,53	37,25	3,77	37,5	7,22	37,75	10,05
Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul	TAD	71.923	72.300	71.923	72.600	72.365	73.000	73.608	74.000	86.087
Jumlah perpustakaan umum daerah dan perpustakaan desa	Unit	45	1 PUD dan 44 PD	1 PUD dan 45 PD	1 PUD dan 49 PD	1 PUD dan 45 PD	1 PUD dan 49 PD	1 PUD dan 45 PD	1 PUD dan 49 PD	1 PUD dan 45 PD	1 PUD dan 51 PD
Persentase koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Persen	41,05	35,25	37	35,31	37,25	0	37,5	36,5	37,75	36,50

## Urusan Kearsipan

Arsip mempunyai fungsi sebagai pusat ingatan, sumber informasi dan alat pengawasan yang sangat diperlukan dalam setiap organisasi publik dalam rangka kegiatan perencanaan, penganalisaan, pengembangan, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, pembuatan laporan, akuntabilitas suatu kegiatan. Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintahan selalu ada kaitannya dengan masalah arsip. Fungsi arsip aktif harus dapat memberikan dampak positif bagi keterbukaan informasi pada pelayanan publik seiring dengan penciptaan aparatur yang bersih dan berwibawa. Arsip mempunyai kontribusi dalam proses penyajian informasi bagi pimpinan untuk membuat keputusan dan merumuskan kebijakan. Fungsi kearsipan sebagai proses kegiatan pengaturan arsip mulai dari penciptaan, penerimaan, pencatatan, dan penyimpanan. Proses kearsipan menggunakan sistem tertentu dalam penyusunan.

pemeliharaan arsip agar dapat ditemukan kembali dengan cepat dan tepat serta untuk pemusnahan arsip berdasarkan kriteria tertentu.

Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Seruyan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.1d. Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Seruyan Tahun 2020-2024**

Indikator Kinerja	Satuan	2020		2021		2022		2023		2024	
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K
Pengelolaan Arsip Secara Baku	Persen	25	56	62	100	66	100	72	100	80	100
Persentase Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Persen	2	300	40	47,61	42,86	75	62,5	73,2	80	100

Tingkat capaian kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan Tahun 2020–2024, dapat terlihat dari tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten seruyan, sebagai berikut :

**Tabel 2.1e - Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan Tahun 2020-2024**

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah Pengunjung pada perpustakaan daerah	-	-	-	11.657	7.900	8.500	8.165	9.000	7.855	4.929	4.929	9.385	15.533	67,38	62,39	57,99	100	100
2	Persentase pengunjung perpustakaan per tahun	-	-	-	TA D	37,00	37,25	37,50	37,75	5,98	3,55	3,77	7,22	10,05	5,98	9,59	10,12	19,25	26,62
3	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	-	-	-	TA D	72.300	72.600	73.000	74.000	71.923	71.923	72.365	73.608	86.087	100	99,48	99,68	100	100
4	Jumlah Perpustakaan Umum Daerah dan Perpustakaan Desa	-	-	-	1 PU D dan 44 PD	1 PU D dan 45 PD	1 PU D dan 45 PD	1 PU D dan 45 PD	1 PU D dan 45 PD	1 PU D dan 45 PD	1 PU D dan 49 PD	1 PU D dan 49 PD	1 PU D dan 49 PD	1 PU D dan 51 PD	100	100	100	100	100
5	Persentase Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	-	-	-	41,08	37,00	37,25	37,50	37,75	35,25	35,51	0	36,50	36,74	85,81	95,97	0	97,33	96,69

6	Pengelolaan Arsip secara Baku	-	-	-	25	62	66	72	80	56	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Peningkatan SDM Pengelolaan Kearsipan	-	-	-	2	40	42,86	62,50	80	300	47,61	75,00	73,20	100	100	100	100	100	100

#### **2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terdapat pada renstra 2025-2029, program, Kegiatan dan Sub kegiatannya sudah sesuai dengan kajian KLHS dan RTRW. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tidak ada yang berdampak besar pada lingkungan hidup.

Berdasarkan perencanaan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup, maka letak Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan berada pada posisi yang strategis. Hal ini dapat dilihat dari alamat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan yang terletak di Jl. A. Yani – Kuala Pembuang yang merupakan pusat pemerintahan dan pusat pendidikan dari ibu kota Kabupaten Seruyan.

Selain itu, letak Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan berada dilingkungan pemerintahan (perkantoran), yang dekat dengan pemukiman penduduk dan sekolah

Dengan sasaran rencana strategis Perpustakaan Nasional RI mengenai pembinaan minat dan budaya baca serta pengembangan sumber daya perpustakaan dan sasaran rencana strategis ANRI mengenai pengelolaan arsip secara baku dan pengembangan sumber daya kearsipan dibandingkan dengan permasalahan capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan akan menjadi isu penting dalam pencapaian kinerja di tahun yang akan datang.

#### **Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan :**

##### **I. Bidang Perpustakaan**

###### **a. Layanan Sirkulasi**

Perpustakaan memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menanamkan minat baca dan mendukung Pendidikan, memberikan pelayanan sirkulasi. Pada pelayanan sirkulasi ini pengunjung perpustakaan datang langsung ke perpustakaan umum daerah.

###### **b. Layanan Perpustakaan keliling**

Disamping layanan sirkulasi, Dinas perpustakaan juga memberikan pelayanan berupa perpustakaan keliling. Pada pelayanan ini memanfaatkan sarana mobil perpustakaan keliling. Disini perpustakaan datang ke masyarakat sebagai pengunjung perpustakaan melalui mobil

perpustakaan keliling. Sehingga pengunjung perpustakaan tidak perlu datang ke Perpustakaan umum daerah.

c. Layanan Story telling

Pada layanan story telling ini perpustakaan memberikan pelayanan seperti perlombaan- perlombaan untuk anak sekolah. Pelayanan ini juga berguna meningkatkan minat baca anak.

Adapun arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan, layanan lebih dikembangkan ke daerah yang belum pernah mendapat pelayanan. perpustakaan keliling ataupun story telling. Jadi pengembangan pelayanan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Seruyan seluruhnya. Melakukan upaya optimalisasi kunjungan ke perpustakaan, peningkatan koleksi buku dan judul buku.

## **II. Bidang Kearsipan**

- a. Memberikan pelayanan informasi kearsipan
- b. Layanan Penyimpanan dan pemeliharaan Arsip
- c. Layanan Konsultasi dan Konsultansi Kearsipan
- d. Layanan Pembenahan/Penataan Arsip
- e. Layanan temu balik arsip

Adapun arah pengembangannya adalah mewujudkan sistem pengelolaan arsip secara baku. Hal ini didukung oleh letak strategis Dinas Perpustakaan yaitu di daerah perkantoran dan tengah kota. Serta meningkatkan SDM pengelolaan arsip, dan pengembangan kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, meningkatkan pelayanan kearsipan, sehingga lebih banyak orang atau instansi yang bisa memanfaatkan layanan kearsipan pada dinas perpustakaan dan kearsipan.

## **2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

### **2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

Salah satu masalah utama yang dihadapi Kabupaten Seruyan yaitu pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bertanggungjawab perlu di tingkatkan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan yang rendah, adapun arah kebijakan yang akan dilakukan yaitu dengan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah bersih (good governance) dan penegakan hukum serta meningkatkan infrastruktur wilayah pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan dan sarana prasarana pelayanan dasar serta sumber daya manusia yang tangguh.

Untuk menjalankan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal, maka diperlukan strategi dan kebijakan yang tepat. Namun ada beberapa permasalahan yang dihadapi perangkat daerah. Permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya sistem pengelolaan arsip daerah. Faktor – factor penyebabnya adalah kurangnya sarana prasarana perpustakaan dan kearsipan, belum optimalnya sistem pengelolaan perpustakaan dan kearsipan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Belum optimalnya kualitas SDM pengelolaan Perpustakaan dan Arsip. faktor – factor penyebabnya adalah kurangnya pembinaan dan pengawasan perpustakaan dan kearsipan, kurangnya pengembangan kualitas SDM perpustakaan dan kearsipan.
3. Belum Optimalnya koleksi bahan pustaka sebagai upaya peningkatan kegemaran membaca. Dalam hal ini bahan pustaka adalah koleksi buku dan judul buku. Factor-faktor penyebabnya adalah kurangnya sarana prasarana perpustakaan, kurangnya upaya pengembangan minat baca anak- anak, pelajar, dan masyarakat umum, kurangnya upaya pengembangan perpustakaan desa/kelurahan.
4. Belum optimalnya kunjungan ke perpustakaan. Faktor – faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah kurangnya mutu dan jenis pelayanan perpustakaan, kurangnya kapasitas masyarakat, kurangnya pembinaan dan pengawasan perpustakaan yang kurang optimal.

Adapun pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran dapat disajikan pada tabel 2.2a berikut ini :

**Tabel 2.2a**  
**Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya sistem pengelolaan arsip daerah	Belum optimalnya sistem pengelolaan arsip daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kurangnya sarana prasarana Kearsipan</li> <li>b. Belum optimalnya sistem pengelolaan Kearsipan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi</li> </ul>
2	Belum optimalnya kualitas SDM pengelolaan Arsip	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan kearsipan</li> <li>b. Pengembangan SDM di bidang Kearsipan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kurangnya pembinaan dan pengawasan Kearsipan</li> <li>b. Kurangnya kualitas SDM Kearsipan</li> </ul>
3	Belum optimalnya koleksi bahan pustaka sebagai upaya peningkatan kegemaran membaca	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kurangnya minat baca anak-anak, pelajar, dan masyarakat umum</li> <li>b. Belum optimalnya pengembangan perpustakaan desa/kelurahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kurangnya koleksi perpustakaan</li> <li>b. Kurangnya sarana prasarana perpustakaan</li> <li>c. Kurangnya kualitas SDM perpustakaan dan kearsipan</li> <li>d. Kurangnya alat transportasi untuk pelaksanaan perpustakaan keliling terbatas, terkait wilayah geografis yang akan dilayani</li> </ul>
4	Belum optimalnya kunjungan ke perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kurang optimalnya pelayanan perpustakaan</li> <li>b. Kurang optimalnya kapasitas masyarakat</li> <li>c. peningkatan pembinaan dan pengawasan perpustakaan yang kurang optimal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kurang optimalnya mutu dan jenis pelayanan perpustakaan</li> <li>b. Kurangnya kapasitas masyarakat</li> <li>c. Kurangnya pembinaan perpustakaan</li> <li>d. Belum optimalnya sistem layanan</li> </ul>

## **Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi**

Dengan sasaran rencana strategis Perpustakaan Nasional RI yaitu pembinaan minat dan budaya baca serta pengembangan sumber daya perpustakaan dan sasaran rencana strategis ANRI mengenai pengelolaan arsip secara baku dan pengembangan sumberdaya kearsipan, maka dapat dijadikan dasar untuk rencana strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan pada tahun yang akan datang.

## **Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Berdasarkan perencanaan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup Strategis, maka letak Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan berada pada posisi yang strategis. Hal ini dapat dilihat dari alamat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan yang terletak di Jl. A. Yani – Kuala Pembuang yang merupakan pusat pemerintahan dan pusat pendidikan dari ibu kota Kabupaten Seruyan.

Selain itu, letak Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan berada dilingkungan pemerintahan (perkantoran), pemukiman penduduk dan sekolah.

Hal ini menunjuk bahwa pemerintah daerah Kabupaten Seruyan menyadari peran pentingnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bagi pembangunan daerah terutama pengembangan sumber daya manusianya.

### **2.2.2 Isu Strategis**

Isu strategis mencakup potensi dampak yang dapat ditimbulkan serta signifikansi dari dampak tersebut terhadap pembangunan dan operasional daerah tersebut. Signifikansi dampak dan potensinya dinilai berdasarkan urgensi, luasan, intensitas dan jumlah masyarakat atau penduduk yang dapat terdampak dari isu tersebut. Selain itu, isu strategis juga memiliki cakupan lebih umum dan dapat terkait antara satu isu dengan isu yang lain baik secara longitudinal (horizontal) maupun hirarkikal (vertikal).

Perumusan isu strategis menjadi sangat krusial dalam perencanaan perangkat daerah sebagai landasan dalam memperkirakan tren dan tantangan atau permasalahan yang dapat muncul di masa atau tahun-tahun berikutnya. Karena dampaknya, isu strategis juga terkait dengan proyeksi dan tujuan serta mitigasi suatu daerah di masa mendatang.

Adapun isu strategis Kabupaten Seruyan terkait dengan tugas fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yaitu untuk mendukung pemerintahan yang bersih (good Govrmance) agar mencapai tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas.

Teknik menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 2.2b**  
**Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah**

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
- Pemerintah daerah harus mendorong dan memotivasi pemerintahan desa agar keberadaan dan pengelolaan perpustakaan masuk dalam dokumen perencanaan desa secara berkelanj	- Terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi yang relevan dengan urusan perpustakaan karena terbata snya jumlah masyarakat lulusan Perguruan	- Pengelolaan Lingkungan dengan meningkatkan kesadaran lingkungan melalui koleksi dan program yang mendukung lingkungan.  - Pen	- Pengembangan Teknologi Digital untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan.  - Pengelolaan Arsip Digital yang efektif untuk menjaga keutuhan dan aksesibili	- Transformasi Digital untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan, seperti pengelolaan arsip digital dan layanan online.  - Pengelolaan Arsip Dinamis	- Pengembangan Infrastruktur Digital dengan meningkatkan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan.  - Pengelo	- minimnya tenaga pustakawan di Perpustakaan yang memang memiliki kompetensi ilmu perpustakaan untuk ditempatkan di perpustakaan, karena dari sisi kebutuhan idealnya perpustakaan memiliki minimal

<p>utan.</p> <p>Untuk perpustakaan sekolah perlu adanya sinergi dan kesamaan persepsi terkait ranah kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing OPD</p> <p>- Desa dan sekolah yang sudah memiliki perpustakaan idealnya harus memiliki pustaka</p>	<p>Tinggi yang memiliki spesifikasi akademik tentang perpustakaan.</p> <p>- Terbatasnya sarpras penduduk kegiatan.</p> <p>- Minat Baca Masyarakat masih rendah ditandai dengan Kunjungan pemustaka</p>	<p>garsipan Dokumen Lingkungan dengan menjadi tempat penyimpanan dokumen-dokumen lingkungan yang penting</p> <p>- Akses Informasi Lingkungan dengan menyediakan akses informasi lingkungan yang relevan bagi masyarakat</p>	<p>tas arsip.</p> <p>- Meningkatkan literasi digital masyarakat melalui program-program pelatihan dan edukasi untuk meningkatkan kemampuan menggunakan teknologi digital.</p> <p>- Pengurangan Penggunaan Kertas dengan beralih ke sistem digital untuk</p>	<p>yang efektif, termasuk penciptaan, pendistribusian, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusunan arsip.</p> <p>- Meningkatkan literasi digital masyarakat melalui program-program pelatihan dan edukasi untuk meningkatkan kemamp</p>	<p>laan Arsip Digital yang efektif untuk menjaga keutuhan dan aksesibilitas arsip.</p> <p>- Peningkatan Kompetensi SDM untuk menghadapi perubahan lingkungan dinamis.</p> <p>- Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau</p>	<p>5 pustakawan</p> <p>- sarpras perpustakaan untuk menunjang kegiatan langsung di perpustakaan seperti Ruang Audio Visual maupun kendaraan pusling yang representatif agar bisa menjangkau semua wilayah di Kabupaten Seruyan secara</p>
---	--	---	---	--	--	---

<p>wan atau setidakn ya memiliki pengelol a perpusta kaan yang kompete n.untuk itu perlu diberika n peningka tan kapasitas dan kemamp uan oleh pemerint ah daerah</p> <p>- Intensitas pembina an dan monitori ng harus terus ditingkat kan, keberada an</p>	<p>masih rendah baik secara konven sional maaup un secara digital.</p> <p>- Terbat asnya SDM yang memili ki kompet ensi yang relevan dengan kearsip an yang ada di LKD.</p> <p>- Kurang nya Pening katan</p>	<p>kat, peneliti, dan pengamb il kebijaka n.</p> <p>- Pengura ngan Penggun aan Kertas dengan menerap kan praktik pengelol aan dokume n digital untuk mengura ngi penggun aan kertas dan dampak lingkung an.</p> <p>-</p>	<p>menghem at sumber daya alam dan mengura ngi limbah.</p> <p>- Aksesibil itas Informasi yaittu memastik an bahwa informasi dapat diakses oleh semua orang, termasuk penyanda ng disabilita s.</p> <p>- Pengelola an Lingkung an melalui koleksi</p>	<p>uan menggu nakan teknolog i digital.</p> <p>- Aksesibi litas Informas i dengan memasti kan bahwa informas i dapat diakses oleh semua orang, termasu k penyand ang disabilit as.</p> <p>- Pengura ngan Penggun aan Kertas dengan</p>	<p>sebagai Taman Baca Masyara kat untuk mening katkan minat baca dan kualitas lingkun gan.</p> <p>- Pengem bangan Koleksi Digital untuk mening katkan aksesibi litas informa si dan mening katkan layanan kepada masyara kat.</p>	<p>merata</p> <p>- koleksi buku baik, koleksi konvensi onal maupun digital masih minim.</p> <p>- min imnya tenaga arsiparis dan pengelol a kearsipan yang kompete n baik kemamp uan maupun specifika si akademi knya</p> <p>- Arsip- arsip</p>
---	--	--	--	--	---	--

<p>perpusde s dan perpusta kaan sekolah harus terus dipacu, dan menggal akan perpusta kaan berbasis inklusi yang lebih menarik</p> <p>- Semua perangka t daerah harus memiliki arsiparis dan pengelol a kearsipa n yang kompete n baik kemamp uan</p>	<p>kafasit as penget ahuan pegaw ai di bidang kearsip an.</p> <p>- Sarpras penunj ang urusan kearsip an di LKD masih kurang.</p> <p>- Belum optima lnya pembin aan kearsip an, baik dari sisi jumlah wilaya h binaan</p>	<p>Pengem bangan Koleksi Lingkun gan dengan mengem bangkan koleksi yang terkait dengan isu lingkung an dan pembang unan berkelan jutan.</p>	<p>dan program yang menduku ng isu lingkung an.</p> <p>- Pengama nan Arsip dengan mengemb angkan sistem pengama nan arsip yang efektif untuk melindun gi arsip dari kerusaka n atau kehilanga n.</p> <p>- Kerja Sama dan Kolaborasi dengan lembaga lain untuk</p>	<p>beralih ke sistem digital untuk menghe mat sumber daya alam dan mengura ngi limbah.</p> <p>- Pengemba ngan Sumber Daya Manusia dengan meningkat kan kompetens i sumber daya manusia di perpustaka an dan kearsipan untuk menghada pi</p>	<p>- Pengaw asan dan Pengam anan Arsip dengan mening katkan pengaw asan dan pengam anan arsip untuk menjaga keutuha n dan keaman an arsip.</p>	<p>tekstual penting yang masih menump uk dan belum tertata di semua perangka t daerah harus segera dipindah kan dengan alih media ke arsip digital (Aplikasi Srikandi) demi untuk menjaga kelestaria nnya sebagai memori kolektif bangsa dengan memberi penguata</p>
---	--	---	---	---	--	--

<p>maupun spesifikasi akademi knya</p> <p>- Arsip arsip tekstual penting yang masih menumpuk dan belum tertata di semua perangkat daerah harus segera dipindahkan dengan alih media ke arsip digital (Aplikasi Srikandi) demi untuk menjaga kelestari</p>	<p>yang harus dikunjungi maupun dari intensitas pembinaan yang diberikan.</p>		<p>meningkatkan layanan dan pengabdian kepada masyarakat.</p>	<p>perubahan lingkungan dinamis.</p>		<p>n baik dari segi anggaran maupun kebijakan yang komprehensif kepada LKD untuk bisa melakukan pendampingan kegiatan baik itu alih media maupun pemilahan dan pemusnahan arsip</p> <p>- Memaksimalkan dukungan dan penekanan ke semua</p>
---	---	--	---	--------------------------------------	--	--

<p>annya sebagai memori kolektif bangsa dengan memberi penguatan baik dari segi anggaran maupun kebijaksanaan<sup>2</sup> yang komprehensif kepada LKD untuk bisa melakukan pendampingan kegiatan baik itu alih media maupun pemilahan dan pemusnahan arsip</p>					<p>aparatur daerah dan perangkat daerah untuk menerafkan korespondensi secara digital sesuai regulasi yang berlaku sesuai SPBE</p> <p>- Sarpras pendukung yang representatif seperti Roll Opack, Mesin Penghancur Kertas, Scanner Alih Media,</p>
---	--	--	--	--	---

<p>- Pemerintah daerah harus memaksimalkan dukungan dan penekanan ke semua aparatur daerah dan perangkat daerah untuk menerafkan korespondensi secara digital sesuai regulasi yang berlaku sesuai SPBE</p> <p>- Sarpras pendukung yang</p>						<p>Alat Fumigasi dan Humidifier untuk LKD maupun OPD harus diadakan secara bertahap sesuai kemampuan daerah</p>
--	--	--	--	--	--	---

representatif seperti Roll Opack, Mesin Penghancur Kertas, Scanner Alih Media, Alat Fumigasi dan Humidifier untuk LKD maupun OPD harus diadakan secara bertahap sesuai kemampuan daerah						
---	--	--	--	--	--	--

### **BAB III**

## **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pada penyusunan Renstra periode tahun 2025-2029 tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sesuai dengan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025–2029 yaitu *“Terwujudnya Kemandirian Daerah melalui Peningkatan Kualitas SDM dan Ketahanan Pangan”* kemudian Renstra menterjemahkan RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

### **3.1 Tujuan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025-2029**

Tujuan adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada waktu tertentu. Pencapaian tujuan dimaksudkan sebagai arah perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tujuan jangka menengah yaitu *“Meningkatnya Literasi Masyarakat dan Meningkatnya Tata Kelola Kearsipan”*.

### **3.2 Sasaran Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025-2029**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai sasaran jangka menengah yaitu *“Meningkatkan Keinginan Baca Masyarakat dan Meningkatkan Tata Kelola Kearsipan”*.

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan tercermin dalam tabel berikut :

**Tabel 3a**  
**Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	INDIKATOR (04)	TARGET TAHUN						KETERANGAN (12)
				2025 (06)	2026 (07)	2027 (08)	2028 (09)	2029 (10)	2030 (11)	
<b>2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>										
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik - Meningkatnya kualitas Pendidikan dan literasi masyarakat	Meningkatnya Literasi Masyarakat dan Meningkatnya Tata Kelola Kearsipan		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Nilai)	41	42	43	44	45	46	
			Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah (Nilai)	50	55	58	60	65	66	
		Meningkatnya Keinginan Baca Masyarakat	49,29	50,30	51,35	52,40	53,45	54,50		
		Meningkatkan Tata Kelola Kearsipan	75	75	75,50	75,50	80	80		
		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	56	58	60	62	65	68		

### 3.3 Strategi Arah Kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

#### 3.3.1 Strategi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Konsep dan kerangka strategi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan disusun atas dasar permasalahan dan isu-isu strategis nasional yang ada dan memperhatikan sasaran-sasaran yang ditetapkan terkait dengan agenda pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Seruyan Periode Tahun 2025-2029, Strategi dan arah kebijakan yang digunakan untuk merespon permasalahan-permasalahan maupun isu-isu strategis yang ada dan disusun sebagai berikut dan dapat di lihat pada tabel 3b :

1. Untuk Meningkatkan literasi masyarakat, strategi yang digunakan adalah Pengembangan minat baca anak-anak, pelajar dan masyarakat umum serta Pengembangan perpustakaan desa/kelurahan, Peningkatan pelayanan perpustakaan, dan Peningkatan pembinaan dan pengawasan perpustakaan. Adapun arah kebijakannya sebagai berikut :
  - a. Meningkatkan koleksi perpustakaan.
  - b. Meningkatkan sarana prasarana perpustakaan.
  - c. Meningkatkan kualitas SDM perpustakaan.
  - d. Meningkatkan mutu dan jenis layanan perpustakaan.
  - e. Meningkatkan pembinaan perpustakaan.
  - f. Meningkatkan system layanan perpustakaan dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
2. Untuk mewujudkan tata kelola kearsipan yang baik sesuai NSPK Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai strategi yaitu peningkatan pengelolaan arsip daerah, Peningkatan pembinaan dan pengawasan Kearsipan, dan Pengembangan SDM dibidang kearsipan. Arah kebijakan dari strategi ini, sebagai berikut :
  - a. Meningkatkan sarana dan prasarana kearsipan.
  - b. Meningkatkan sistem layanan kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
  - c. Meningkatkan pembinaan kearsipan.
  - d. Meningkatkan kualitas SDM kearsipan.

**Tabel 3b.**  
**Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Periode Tahun 2025-2029**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Mewujudkan tata kelola organisasi perangkat daerah yang efektif, efisien dan akuntabel, meningkatkan literasi masyarakat, dan meningkatkan keamanan dokumen pemerintahan	Meningkatkan Literasi Baca Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan minat baca anak-anak, pelajar dan masyarakat umum serta Pengembangan perpustakaan desa/kelurahan;</li> <li>b. Peningkatan pelayanan perpustakaan;</li> <li>c. Peningkatan pembinaan dan pengawasan perpustakaan;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan koleksi perpustakaan;</li> <li>b. Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan</li> <li>c. Meningkatkan kualitas SDM perpustakaan</li> <li>d. Meningkatkan mutu dan jenis layanan perpustakaan;</li> <li>e. Meningkatkan pembinaan perpustakaan;</li> <li>f. Meningkatkan system layanan perpustakaan dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;</li> </ul>
	Tata Kelola Kearsipan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan pengelolaan arsip daerah;</li> <li>b. Peningkatan pembinaan dan pengawasan Kearsipan;</li> <li>c. Pengembangan SDM dibidang kearsipan;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan sarana dan prasarana kearsipan;</li> <li>b. Meningkatkan system layanan kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;</li> <li>c. Meningkatkan pembinaan kearsipan;</li> <li>d. Meningkatkan kualitas SDM kearsipan;</li> </ul>

### 3.3.2 Tema Tahapan Pembangunan

Kesinambungan pembangunan setiap tahun dalam jangka waktu lima tahun, RPJMD Kabupaten Seruyan dirancang berdasarkan tema pembangunan tahunan. Tema ini menjadi landasan dalam merumuskan arah kebijakan yang lebih jelas sehingga memudahkan implementasi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Setiap tema memiliki keterkaitan dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Tema pembangunan Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 adalah Transformasi Pembangunan Menuju Kabupaten Seruyan yang berkelanjutan dan berdaya saing. Tema pembangunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Seruyan adalah Mewujudkan Literasi Masyarakat dan Tata Kelola Kearsipan yang tujuannya untuk Meningkatnya Literasi Masyarakat dan Meningkatnya Tata Kelola Kearsipan sebagai dasar pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

**Tabel 3c**

**Penahapan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 5 Tahun Mendatang**

<b>Tahap I (2025)</b>	<b>Tahap II (2026)</b>	<b>Tahap III (2027)</b>	<b>Tahap IV (2028)</b>	<b>Tahap V (2029)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan sarana dan prasarana.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyebarluasan/ Sosialisasi kebijakan</li> <li>• Implementasi kebijakan dan program strategis.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyebarluasan fungsi organisasi sampai tingkat desa.</li> <li>• Meningkatkan peran serta masyarakat.</li> <li>• Sosialisasi program kegiatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring dan evaluasi program</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keberlanjutan dan optimalisasi program</li> </ul>

### 3.3.3 Arah Kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Arah Kebijakan yang diambil dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran Kepala Daerah terpilih periode 2025-2029, maka arah kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koleksi perpustakaan.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan.
3. Meningkatkan kualitas SDM perpustakaan.
4. Meningkatkan mutu dan jenis layanan perpustakaan.
5. Meningkatkan pembinaan perpustakaan.
6. Meningkatkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
7. Meningkatkan sarana dan prasarana kearsipan.
8. Meningkatkan sistem layanan kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
9. Meningkatkan pembinaan kearsipan.
10. Meningkatkan kualitas SDM kearsipan.

**Tabel 3d**

**Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan**

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
1.	Identifikasi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai	1.Meningkatkan akses pembelajaran dan kearsipan berbasis digital	1. Meningkatkan koleksi perpustakaan.	
2.	Menganalisa kebijakan yang ada saat ini, apakah perlu dilakukan perubahan atau penyesuaian untuk mencapai sasaran dan tujuan.	2.Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan formal dan non formal	Meningkatkan saran dan prasarana perpustakaan.	
3	Melakukan identifikasi stakeholder yang terkait, seperti perangkat daerah yang terkait, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang ada.	3.Meningkatkan kualitas pelayanan publik pemerintah daerah	4. Meningkatkan kualitas SDM perpustakaan.	
4	Mengembangkan strategi, yaitu dengan meningkatkan sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat.		5. Meningkatkan mutu dan jenis layanan perpustakaan.	
5	Menentukan prioritas kebijakan yang akan diimplementasikan. Mengembangkan rencana aksi yang spesifik, terukur dan dapat diimplemmentasikan untuk mencapai tujuan dan sasaran.		6. Meningkatkan pembinaan perpustakaan.	
6	Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan rencana aksi dengan stakeholder terkait untuk memastikan bahwa kebijakan itu efektif dan efisien.		7. Meningkatkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi infotmasi dan komunikasi.	
			8. Meningkatkan sarana dan prasarana kearsipan.	
			9. Meningkatkan sistem layanan kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.	
			10. Meningkatkan pembinaan kearsipan.	
			11. Meningkatkan kualitas SDM kearsipan.	

**BAB IV**  
**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA**  
**PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

Pemilihan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam mendukung visi, dan misi Kabupaten Seruyan. Kebutuhan anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan pada awal renstra yaitu tahun 2025 sebesar Rp.7.914.208.927,00 untuk tahun 2026 sebesar Rp.756.924.291,00, tahun 2027 sebesar Rp. 7.990.291.269,00, tahun 2028 sebesar Rp.9.735.326.595,00, tahun 2029 sebesar Rp.9.992.613.687,00 dan tahun 2030 sebesar Rp. 9.992.613.687,00.

Adapun rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pada awal renstra tahun 2025 ada 6 program 19 kegiatan dan 55 sub kegiatan, untuk tahun 2026 ada 6 program 20 kegiatan dan 67 sub kegiatan, untuk tahun 2027 ada 19 program 20 kegiatan 66 sub kegiatan, untuk tahun 2028 ada 19 program 19 kegiatan 66 sub kegiatan, untuk tahun 2029 ada 19 program 19 kegiatan 66 sub kegiatan, dan untuk tahun 2030 ada 19 program 19 kegiatan dan 66 sub kegiatan.

Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolak ukur keberhasilannya, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan menetapkan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif untuk pelaksanaan program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan dalam kurun waktu 2025-2029 seperti yang tertuang dalam tabel-tabel berikut :

**Tabel 4.1a. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan  
Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan**

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)		
<b>2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>									
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik - Meningkatnya kualitas Pendidikan dan literasi masyarakat	Meningkatnya Literasi Masyarakat dan Meningkatnya Tata Kelola Kearsipan				Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Nilai)				
					Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah (Nilai)				
		Meningkatnya Keinginan Baca Masyarakat	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Perangkat Daerah				Tingkat Kegemaran Membaca (Nilai)		
							Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.23.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.23.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.23.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.23.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.23.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.23.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.23.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.23.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.23.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Baik dan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.23.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.23.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.23.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.23.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.23.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.23.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.23.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.23.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Tersusunnya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah dengan Baik dan Tepat Waktu	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.23.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.23.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.23.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.23.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.23.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.23.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Teradministrasinya Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Dengan Kompetensi di Bidangny	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	2.23.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2.23.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2.23.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.23.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.23.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.23.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.23.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.23.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2.23.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	2.23.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2.23.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.23.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.23.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.23.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Administrasi Umum dengan Baik	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.23.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.23.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.23.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.23.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.23.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.23.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.23.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.23.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.23.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.23.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.23.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.23.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.23.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.23.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.23.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.23.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.23.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.23.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.23.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.23.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah dengan Baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.23.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.23.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.23.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.23.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.23.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.23.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
					Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Nilai)	2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
				Terkelolanya Perpustakaan di Wilayah Kabupaten Seruyan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar)	2.23.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Data dan informasi Perpustakaan (Dokumen)	2.23.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Eksemplar)	2.23.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK (Perpustakaan)	2.23.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	2.23.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	2.23.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya (Perpustakaan)	2.23.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	2.23.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	2.23.02.2.01.0004 - Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	
					Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya (Perpustakaan)	2.23.02.2.01.0011 - Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	2.23.02.2.01.0013 - Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	2.23.02.2.01.0016 - Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Data dan informasi Perpustakaan (Dokumen)	2.23.02.2.01.0017 - Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	
					Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar)	2.23.02.2.01.0018 - Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	
					Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Eksemplar)	2.23.02.2.01.0019 - Pengembangan Kekhasan Koleksi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	
						Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK (Perpustakaan)	2.23.02.2.01.0020 - Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
				Terlaksananya Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya (Orang)	2.23.02.2.02 - Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan (Perpustakaan)	2.23.02.2.02 - Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat (Lokus)	2.23.02.2.02 - Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota (Orang)	2.23.02.2.02 - Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya (Orang)	2.23.02.2.02.0006 - Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan (Perpustakaan)	2.23.02.2.02.0007 - Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota (Orang)	2.23.02.2.02.0009 - Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat (Lokus)	2.23.02.2.02.0010 - Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	
			Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno		Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	
				Terlestarikannya Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno (Orang)	2.23.03.2.01 - Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno (Orang)	2.23.03.2.01.0003 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	
				Jumlah Jenis Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan di Kabupaten Seruyan	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (Eksemplar)	2.23.03.2.02 - Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (Eksemplar)	2.23.03.2.02 - Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (Eksemplar)	2.23.03.2.02.0003 - Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	
					Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (Eksemplar)	2.23.03.2.02.0004 - Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	
		Meningkatkan Tata Kelola Kearsipan			Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Perangkat Daerah		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Baik dan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.23.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.23.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.23.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.23.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.23.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.23.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.23.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.23.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.23.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.23.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Baik dan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.23.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.23.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.23.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.23.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.23.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.23.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.23.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.23.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Tersusunnya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah dengan Baik dan Tepat Waktu	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.23.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.23.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.23.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.23.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.23.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.23.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Teradministrasinya Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Dengan Kompetensi di Bidangnyanya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	2.23.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2.23.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2.23.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.23.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.23.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.23.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.23.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.23.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2.23.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	2.23.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2.23.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.23.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.23.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.23.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Administrasi Umum dengan Baik	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.23.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.23.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.23.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.23.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.23.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.23.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.23.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.23.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.23.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.23.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.23.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.23.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.23.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.23.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.23.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.23.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.23.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.23.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.23.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.23.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah dengan Baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.23.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.23.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.23.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.23.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.23.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.23.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis		Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	
					Persentase Perangkat Daerah yang mengelola Arsip secara baku (%)	2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	
				Tersedianya Arsip Dinamis Kabupaten yang terkelola Sesuai Standar Baku	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.24.02.2.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan (Berkas)	2.24.02.2.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan (Berkas)	2.24.02.2.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan (Berkas)	2.24.02.2.01.0001 - Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	
					Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan (Berkas)	2.24.02.2.01.0002 - Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.24.02.2.01.0003 - Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersedianya Arsip Statis Daerah yang diserahkan ke LKD	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis (Arsip)	2.24.02.2.02 - Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Statis (Arsip)	
					Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI (Arsip)	2.24.02.2.02 - Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Statis (Arsip)	
					Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI (Arsip)	2.24.02.2.02.0001 - Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	
					Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis (Arsip)	2.24.02.2.02.0004 - Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	
				Tersedianya unit kearsipan yang memberdayakan simpul jaringan informasi kearsipan nasional	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	2.24.02.2.03 - Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN (Pengguna)	2.24.02.2.03 - Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN (Pengguna)	2.24.02.2.03.0001 - Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	
					Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	2.24.02.2.03.0002 - Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Sesuai NSPK		Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (%)	2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersedianya arsip dinamis yang sudah di daftarkan dan disetujui ANRI/Provinsi/Kabupaten untuk dimusnahkan	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun (Arsip)	2.24.03.2.01 - Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	
					Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan (Berkas)	2.24.03.2.01 - Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	
					Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan (Berkas)	2.24.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	
					Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun (Arsip)	2.24.03.2.01.0004 - Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	
				Tersedianya Daftar Arsip yang dilakukan Penyelamatan Arsip pada Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (Arsip)	2.24.03.2.03 - Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	
					Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan (Arsip)	2.24.03.2.03 - Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan (Arsip)	2.24.03.2.03 - Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	
					Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (Daftar)	2.24.03.2.03 - Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	
					Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (Daftar)	2.24.03.2.03.0001 - Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (Arsip)	2.24.03.2.03.0002 - Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan (Arsip)	2.24.03.2.03.0003 - Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	
					Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan (Arsip)	2.24.03.2.03.0004 - Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersedianya Daftar Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip (Arsip)	2.24.03.2.04 - Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	
					Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan (Arsip)	2.24.03.2.04 - Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	
					Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan (Arsip)	2.24.03.2.04.0001 - Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	
					Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip (Arsip)	2.24.03.2.04.0002 - Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	
				Tersedianya Daftar arsip statis yang ditemukan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang (Arsip)	2.24.03.2.05 - Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	
					Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan (Arsip)	2.24.03.2.05 - Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	
					Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman (Arsip)	2.24.03.2.05 - Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	
					Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan (Arsip)	2.24.03.2.05.0001 - Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	
					Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang (Arsip)	2.24.03.2.05.0002 - Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	
					Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman (Arsip)	2.24.03.2.05.0003 - Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
			Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup		Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Persentase)	2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	
				Tersedianya SOP Arsip yang Bersifat Tertutup yang Digunakan Perangkat Daerah	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Arsip)	2.24.04.2.01 - Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	
					Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan (SOP)	2.24.04.2.01 - Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	
					Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan (SOP)	2.24.04.2.01.0003 - Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	
					Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Arsip)	2.24.04.2.01.0004 - Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	

Tabel 4.1b Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				7.346.452.09 1,00		7.307.483.34 8,00		7.547.639.57 9,00		7.950.209.21 1,00		8.374.602.84 8,00		
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.046.452.09 1,00		6.007.483.34 8,00		6.247.639.57 9,00		6.650.209.21 1,00		7.074.602.84 8,00		
Terpenuhnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	6.046.452.09 1,00	100	6.007.483.34 8,00	100	6.247.639.57 9,00	100	6.650.209.21 1,00	100	7.074.602.84 8,00	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2.23.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				99.000.000,0 0		97.200.000,0 0		30.600.000,0 0		85.600.000,0 0		92.000.000,0 0		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Baik dan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	99.000.000,0 0	1	97.200.000,0 0	1	30.600.000,0 0	1	85.600.000,0 0	1	92.000.000,0 0		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.23.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				25.000.000,00		22.700.000,00		3.100.000,00		3.150.000,00		3.500.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6	25.000.000,00	6	22.700.000,00	6	3.100.000,00	6	3.150.000,00	6	3.500.000,00		
2.23.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.500.000,00		1.500.000,00		1.300.000,00		2.500.000,00		3.500.000,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1	1.300.000,00	1	2.500.000,00	1	3.500.000,00		
2.23.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.500.000,00		1.500.000,00		1.300.000,00		1.700.000,00		2.500.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1	1.300.000,00	1	1.700.000,00	1	2.500.000,00		
2.23.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				25.000.000,00		25.500.000,00		19.600.000,00		21.250.000,00		22.500.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	5	25.000.000,00	5	25.500.000,00	5	19.600.000,00	5	21.250.000,00	5	22.500.000,00		
2.23.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				46.000.000,00		46.000.000,00		5.300.000,00		57.000.000,00		60.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	46.000.000,00	1	46.000.000,00	1	5.300.000,00	1	57.000.000,00	1	60.000.000,00		
2.23.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.355.486,13		4.355.534,94		4.470.883,57		4.717.248,21		5.095.421,84		
				6,00		8,00		9,00		1,00		8,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Baik dan Tepat Waktu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	2	4.355.486.136,00	2	4.355.534.948,00	2	4.470.883.579,00	2	4.717.248.211,00	2	5.095.421.848,00		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	25	30		33		35		40		45			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3	3		3		3		3		3			
2.23.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.211.576.136,00		4.211.624.948,00		4.297.883.579,00		4.538.748.211,00		4.905.421.848,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	25	30	4.211.576.136,00	33	4.211.624.948,00	35	4.297.883.579,00	40	4.538.748.211,00	45	4.905.421.848,00		
2.23.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				111.100.000,00		111.100.000,00		130.000.000,00		135.000.000,00		140.000.000,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3	3	111.100.000,00	3	111.100.000,00	3	130.000.000,00	3	135.000.000,00	3	140.000.000,00		
2.23.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				30.000.000,00		30.000.000,00		31.000.000,00		31.500.000,00		35.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	31.000.000,00	2	31.500.000,00	2	35.000.000,00		
2.23.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan				2.810.000,00		2.810.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		15.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	2.810.000,00	12	2.810.000,00	12	12.000.000,00	12	12.000.000,00	12	15.000.000,00		
2.23.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				35.300.000,00		35.300.000,00		48.000.000,00		52.500.000,00		59.200.000,00		
Tersusunnya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah dengan Baik dan Tepat Waktu	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2	35.300.000,00	2	35.300.000,00	2	48.000.000,00	2	52.500.000,00	2	59.200.000,00		
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	4		4		4		4		4			
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
2.23.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				5.000.000,00		5.000.000,00		12.000.000,00		15.000.000,00		21.000.000,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	12.000.000,00	2	15.000.000,00	2	21.000.000,00		
2.23.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				5.000.000,00		5.000.000,00		5.500.000,00		5.500.000,00		5.500.000,00		
Tertersedianya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.500.000,00	2	5.500.000,00	2	5.500.000,00		
2.23.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan				25.300.000,00		25.300.000,00		30.500.000,00		32.000.000,00		32.700.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Barang Milik Daerah pada SKPD														
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	4	25.300.000,00	4	25.300.000,00	4	30.500.000,00	4	32.000.000,00	4	32.700.000,00		
2.23.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				311.800.000,00		346.981.000,00		508.000.000,00		531.740.000,00		540.150.000,00		
Teradministrasinya Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Dengan Kompetensi di Bidangnyanya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3	3	311.800.000,00	3	346.981.000,00	3	508.000.000,00	4	531.740.000,00	4	540.150.000,00		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1		1		2		2		2			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	10	7		7		8		8		10			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	18	18		13		13		13		13			
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2	0		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	3	0		2		2		2		2			
2.23.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				65.000.000,00		62.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	65.000.000,00	1	62.000.000,00	2	130.000.000,00	2	130.000.000,00	2	130.000.000,00		
2.23.01.2.05.0003 - Pendataan dan				2.500.000,00		20.281.000,00		25.000.000,00		26.740.000,00		27.150.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2	4	2.500.000,00	4	20.281.000,00	4	25.000.000,00	4	26.740.000,00	4	27.150.000,00		
2.23.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				0,00		10.000.000,00		59.000.000,00		61.000.000,00		61.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	3	0	0,00	2	10.000.000,00	2	59.000.000,00	2	61.000.000,00	2	61.000.000,00		
2.23.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		13.000.000,00		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2	0	0,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	13.000.000,00		
2.23.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				59.700.000,00		59.700.000,00		65.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3	3	59.700.000,00	3	59.700.000,00	3	65.000.000,00	4	85.000.000,00	4	85.000.000,00		
2.23.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	10	7	50.000.000,00	7	50.000.000,00	8	60.000.000,00	8	60.000.000,00	10	65.000.000,00		
2.23.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				134.600.000,00		135.000.000,00		159.000.000,00		159.000.000,00		159.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	18	18	134.600.000,00	13	135.000.000,00	13	159.000.000,00	13	159.000.000,00	13	159.000.000,00		
2.23.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				283.048.150,00		300.927.400,00		312.050.000,00		370.250.000,00		381.750.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Administrasi Umum dengan Baik	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	283.048.150,00	3	300.927.400,00	3	312.050.000,00	3	370.250.000,00	3	381.750.000,00		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.774	1.774		1.774		1.774		1.774		1.774			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	13	22		25		25		35		37			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
2.23.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				14.264.150,00		15.000.000,00		15.800.000,00		17.000.000,00		17.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	14.264.150,00	1	15.000.000,00	1	15.800.000,00	1	17.000.000,00	1	17.000.000,00		
2.23.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				47.600.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		57.000.000,00		57.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	47.600.000,00	3	50.000.000,00	3	55.000.000,00	3	57.000.000,00	3	57.000.000,00		
2.23.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				70.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	70.000.000,00	4	75.000.000,00	4	75.000.000,00	4	80.000.000,00	4	80.000.000,00		
2.23.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang				7.434.000,00		8.177.400,00		8.500.000,00		8.500.000,00		9.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Cetakan dan Penggandaan															
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	7.434.000,00	2	8.177.400,00	2	8.500.000,00	2	8.500.000,00	2	9.000.000,00			
2.23.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				7.750.000,00		7.750.000,00		7.750.000,00		7.750.000,00		7.750.000,00			
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.774	1.774	7.750.000,00	1.774	7.750.000,00	1.774	7.750.000,00	1.774	7.750.000,00	1.774	7.750.000,00			
2.23.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				136.000.000,00		145.000.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00		211.000.000,00			
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	13	22	136.000.000,00	25	145.000.000,00	25	150.000.000,00	35	200.000.000,00	37	211.000.000,00			
2.23.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				174.000.000,00		29.000.000,00		0,00		0,00		0,00			
Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	6	174.000.000,00	6	29.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
2.23.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				174.000.000,00		29.000.000,00		0,00		0,00		0,00			
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	6	174.000.000,00	6	29.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
2.23.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				588.017.805,00		622.705.000,00		646.836.000,00		648.371.000,00		649.581.000,00			
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	588.017.805,00	12	622.705.000,00	12	646.836.000,00	12	648.371.000,00	12	649.581.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.000	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000			
2.23.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				11.550.000,00		12.705.000,00		12.705.000,00		13.240.000,00		13.450.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.000	1.000	11.550.000,00	1.000	12.705.000,00	1.000	12.705.000,00	1.000	13.240.000,00	1.000	13.450.000,00		
2.23.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				103.262.181,00		110.000.000,00		113.590.000,00		114.590.000,00		115.590.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		12	103.262.181,00	12	110.000.000,00	12	113.590.000,00	12	114.590.000,00	12	115.590.000,00		
2.23.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				473.205.624,00		500.000.000,00		520.541.000,00		520.541.000,00		520.541.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	473.205.624,00	12	500.000.000,00	12	520.541.000,00	12	520.541.000,00	12	520.541.000,00		
2.23.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				199.800.000,00		219.835.000,00		231.270.000,00		244.500.000,00		256.500.000,00		
Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah dengan Baik	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	15	15	199.800.000,00	20	219.835.000,00	20	231.270.000,00	25	244.500.000,00	25	256.500.000,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	9	9		10		10		10		10			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.23.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				109.150.000,00		120.065.000,00		130.000.000,00		140.000.000,00		150.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	9	9	109.150.000,00	10	120.065.000,00	10	130.000.000,00	10	140.000.000,00	10	150.000.000,00		
2.23.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				35.650.000,00		39.270.000,00		39.270.000,00		41.000.000,00		41.500.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	15	15	35.650.000,00	20	39.270.000,00	20	39.270.000,00	25	41.000.000,00	25	41.500.000,00		
2.23.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				55.000.000,00		60.500.000,00		62.000.000,00		63.500.000,00		65.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	55.000.000,00	1	60.500.000,00	1	62.000.000,00	1	63.500.000,00	1	65.000.000,00		
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				1.267.452,00		1.252.500,00		1.244.500,00		1.244.500,00		1.244.500,00		
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Nilai)	40	75,95	1.267.452,00	77,62	1.252.500,00	79,3	1.244.500,00	80,97	1.244.500,00	80,97	1.244.500,00	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	47,11	50,30		51,35		52,40		53,45		54,50			
2.23.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				822.452.000,00		502.500.000,00		560.752.000,00		560.752.000,00		560.752.000,00		
Terkelolanya Perpustakaan di Wilayah Kabupaten Seruyan	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Eksemplar)	30	50	822.452.000,00	50	502.500.000,00	50	560.752.000,00	50	560.752.000,00	50	560.752.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK (Perpustakaan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan (Dokumen)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar)	300	700		700		1.000		1.400		1.350			
	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	50	114		140		3		3		3			
	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya (Perpustakaan)	4	1		0		1		1		1			
	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	1	10		15		17		18		18			
	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	5	12		13		14		15		15			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.23.02.2.01.0004 - Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan				45.000.000,00		65.000.000,00		60.000.000,00		68.252.000,00		73.252.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	5	12	45.000.000,00	13	65.000.000,00	14	60.000.000,00	15	68.252.000,00	15	73.252.000,00		
2.23.02.2.01.0011 - Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				507.116.000,00		0,00		118.252.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya (Perpustakaan)	4	1	507.116.000,00	0	0,00	1	118.252.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
2.23.02.2.01.0013 - Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota				42.634.000,00		90.000.000,00		65.000.000,00		75.000.000,00		70.000.000,00		
Terlaksananya pembinaan perpustakaan umum dan khusus sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	1	10	42.634.000,00	15	90.000.000,00	17	65.000.000,00	18	75.000.000,00	18	70.000.000,00		
2.23.02.2.01.0016 - Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000,00		135.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat	50	114	50.000.000,00	140	135.000.000,00	3	35.000.000,00	3	35.000.000,00	3	35.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Daerah Kabupaten/Kota (Orang)													
2.23.02.2.01.0017 - Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan				75.000.000,00		100.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		
Terlaksananya Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan (Dokumen)	1	2	75.000.000,00	2	100.000.000,00	2	120.000.000,00	2	120.000.000,00	2	120.000.000,00		
2.23.02.2.01.0018 - Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan				92.750.000,00		100.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Kabupaten/Kota untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar)	300	700	92.750.000,00	700	100.000.000,00	1.000	150.000.000,00	1.400	150.000.000,00	1.350	150.000.000,00		
2.23.02.2.01.0019 - Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota				5.000.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		
Terlaksananya Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Eksemplar)	30	50	5.000.000,00	50	7.500.000,00	50	7.500.000,00	50	7.500.000,00	50	7.500.000,00		
2.23.02.2.01.0020 - Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik				4.952.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan Manajemen Layanan TIK	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK (Perpustakaan)	0	1	4.952.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
2.23.02.2.02 - Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				445.000.000,00		750.000.000,00		683.748.000,00		683.748.000,00		683.748.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya (Orang)	2	10	445.000.000,00	10	750.000.000,00	10	683.748.000,00	10	683.748.000,00	10	683.748.000,00		
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota (Orang)	40	41		40	40	40	40	40	40	40			
	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat (Lokus)	50	60		70	71	73	75						
	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan (Perpustakaan)	2	5		5	5	5	5						
2.23.02.2.02.0006 - Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				150.000.000,00		200.000.000,00		220.000.000,00		220.000.000,00		220.000.000,00		
Terlaksananya Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya (Orang)	2	10	150.000.000,00	10	200.000.000,00	10	220.000.000,00	10	220.000.000,00	10	220.000.000,00		
2.23.02.2.02.0007 - Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial				20.000.000,00		100.000.000,00		83.748.000,00		83.748.000,00		83.748.000,00		
Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan (Perpustakaan)	2	5	20.000.000,00	5	100.000.000,00	5	83.748.000,00	5	83.748.000,00	5	83.748.000,00		
2.23.02.2.02.0009 - Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca				175.000.000,00		300.000.000,00		220.000.000,00		220.000.000,00		220.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota (Orang)	40	41	175.000.000,00	40	300.000.000,00	40	220.000.000,00	40	220.000.000,00	40	220.000.000,00		
2.23.02.2.02.0010 - Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				100.000.000,00		150.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		
Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Dasar dan masyarakat dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat (Lokus)	50	60	100.000.000,00	70	150.000.000,00	71	160.000.000,00	73	160.000.000,00	75	160.000.000,00		
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				32.548.000,00		47.500.000,00		55.500.000,00		55.500.000,00		55.500.000,00		
Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	69,70	72,73	32.548.000,00	74,24	47.500.000,00	75,76	55.500.000,00	77,27	55.500.000,00	78,79	55.500.000,00	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2.23.03.2.01 - Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota				20.000.000,00		20.500.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Terlestarikannya Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno (Orang)	6	2	20.000.000,00	2	20.500.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00		
2.23.03.2.01.0003 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno				20.000.000,00		20.500.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno (Orang)	6	2	20.000.000,00	2	20.500.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00		
2.23.03.2.02 - Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh				12.548.000,00		27.000.000,00		15.500.000,00		15.500.000,00		15.500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota															
Jumlah Jenis Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan di Kabupaten Seruyan	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (Eksemplar)	50	700	12.548.000,00	700	27.000.000,00	500	15.500.000,00	500	15.500.000,00	500	15.500.000,00			
	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (Eksemplar)	50	50		100		50		50		50				
2.23.03.2.02.0003 - Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara				7.500.000,00		15.000.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00			
Terlaksananya Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (Eksemplar)	50	50	7.500.000,00	100	15.000.000,00	50	7.500.000,00	50	7.500.000,00	50	7.500.000,00			
2.23.03.2.02.0004 - Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara				5.048.000,00		12.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00			
Terlaksananya Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (Eksemplar)	50	700	5.048.000,00	700	12.000.000,00	500	8.000.000,00	500	8.000.000,00	500	8.000.000,00			
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				410.472.200,00		535.504.200,00		681.700.000,00		684.800.000,00		689.700.000,00			
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				245.972.200,00		262.004.200,00		324.700.000,00		335.800.000,00		387.700.000,00			
Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	75	75	245.972.200,00	75,50	262.004.200,00	75,50	324.700.000,00	80	335.800.000,00	80	387.700.000,00	2.23.2.24.0.00.01 .0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola Arsip secara baku (%)	100	80		90		100		100		100				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.24.02.2.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota				78.223.000,00		84.820.200,00		92.400.000,00		95.500.000,00		107.000.000,00		
Tersedianya Arsip Dinamis Kabupaten yang dikelola Sesuai Standar Baku	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	2	7	78.223.000,00	7	84.820.200,00	10	92.400.000,00	10	95.500.000,00	10	107.000.000,00		
	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan (Berkas)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan (Berkas)	4	2		2		4		4		4			
2.24.02.2.01.0001 - Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis				16.341.000,00		19.000.000,00		22.000.000,00		23.000.000,00		25.000.000,00		
Terkelolanya Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan (Berkas)	1	1	16.341.000,00	1	19.000.000,00	1	22.000.000,00	1	23.000.000,00	1	25.000.000,00		
2.24.02.2.01.0002 - Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis				29.382.000,00		32.320.200,00		35.400.000,00		37.500.000,00		45.000.000,00		
Terkelolanya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan (Berkas)	4	2	29.382.000,00	2	32.320.200,00	4	35.400.000,00	4	37.500.000,00	4	45.000.000,00		
2.24.02.2.01.0003 - Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				32.500.000,00		33.500.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		37.000.000,00		
Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	2	7	32.500.000,00	7	33.500.000,00	10	35.000.000,00	10	35.000.000,00	10	37.000.000,00		
2.24.02.2.02 - Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota				48.900.000,00		44.450.000,00		85.300.000,00		75.300.000,00		96.700.000,00		
Tersedianya Arsip Statis Daerah yang diserahkan ke LKD	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis (Arsip)	4	2	48.900.000,00	4	44.450.000,00	4	85.300.000,00	4	75.300.000,00	5	96.700.000,00		
	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI (Arsip)	4	2		4		4		2		4			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.24.02.2.02.0001 - Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI				32.400.000,00		4.050.000,00		42.500.000,00		32.500.000,00		46.700.000,00		
Terkelolanya Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI (Arsip)	4	2	32.400.000,00	4	4.050.000,00	4	42.500.000,00	2	32.500.000,00	4	46.700.000,00		
2.24.02.2.02.0004 - Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis				16.500.000,00		40.400.000,00		42.800.000,00		42.800.000,00		50.000.000,00		
Tertindaknya Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis (Arsip)	4	2	16.500.000,00	4	40.400.000,00	4	42.800.000,00	4	42.800.000,00	5	50.000.000,00		
2.24.02.2.03 - Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota				118.849.200,00		132.734.000,00		147.000.000,00		165.000.000,00		184.000.000,00		
Tersedianya unit kearsipan yang memberdayakan simpul jaringan informasi kearsipan nasional	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	2	2	118.849.200,00	2	132.734.000,00	2	147.000.000,00	2	165.000.000,00	2	184.000.000,00		
	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN (Pegguna)	40	20		30		40		40		40			
2.24.02.2.03.0001 - Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				25.000.000,00		29.500.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		65.000.000,00		
Tersedianya Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN (Pegguna)	40	20	25.000.000,00	30	29.500.000,00	40	40.000.000,00	40	50.000.000,00	40	65.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.24.02.2.03.0002 - Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				93.849.200,00		103.234.000,00		107.000.000,00		115.000.000,00		119.000.000,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	2	2	93.849.200,00	2	103.234.000,00	2	107.000.000,00	2	115.000.000,00	2	119.000.000,00		
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				148.000.000,00		244.500.000,00		330.000.000,00		309.000.000,00		267.000.000,00		
Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (%)	16,67	16,67	148.000.000,00	16,67	244.500.000,00	16,67	330.000.000,00	16,67	309.000.000,00	16,67	267.000.000,00	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2.24.03.2.01 - Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				37.500.000,00		42.500.000,00		60.000.000,00		75.000.000,00		65.000.000,00		
Tersedianya arsip dinamis yang sudah di daftarkan dan disetujui ANRI/Provinsi/Kabupaten untuk dimusnahkan	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan (Berkas)	1	1	37.500.000,00	1	42.500.000,00	2	60.000.000,00	4	75.000.000,00	6	65.000.000,00		
	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun (Arsip)	6	3		3		3		5		4			
2.24.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun				7.500.000,00		7.500.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan (Berkas)	1	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00	2	15.000.000,00	4	20.000.000,00	6	25.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.24.03.2.01.0004 - Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				30.000.000,00		35.000.000,00		45.000.000,00		55.000.000,00		40.000.000,00		
Tersusunnya Daftar Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun (Arsip)	6	3	30.000.000,00	3	35.000.000,00	3	45.000.000,00	5	55.000.000,00	4	40.000.000,00		
2.24.03.2.03 - Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan				34.500.000,00		57.000.000,00		95.000.000,00		87.000.000,00		70.000.000,00		
Tersedianya Daftar Arsip yang dilakukan Penyelamatan Arsip pada Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan (Arsip)	1	1	34.500.000,00	2	57.000.000,00	2	95.000.000,00	2	87.000.000,00	2	70.000.000,00		
	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (Arsip)	1	1		1		2		2		1			
	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (Daftar)	1	1		2		3		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan (Arsip)	1	1		1		1		1		1			
2.24.03.2.03.0001 - Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				7.500.000,00		12.000.000,00		45.000.000,00		35.000.000,00		20.000.000,00		
Terkelolanya Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (Daftar)	1	1	7.500.000,00	2	12.000.000,00	3	45.000.000,00	2	35.000.000,00	2	20.000.000,00		
2.24.03.2.03.0002 - Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				10.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		17.000.000,00		10.000.000,00		
Terkelolanya Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (Arsip)	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	2	15.000.000,00	2	17.000.000,00	1	10.000.000,00		
2.24.03.2.03.0003 - Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan				9.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan (Arsip)	1	1	9.000.000,00	2	15.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	25.000.000,00		
2.24.03.2.03.0004 - Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan				8.000.000,00		20.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan (Arsip)	1	1	8.000.000,00	1	20.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00		
2.24.03.2.04 - Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota				22.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		70.000.000,00		65.000.000,00		
Tersedianya Daftar Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip (Arsip)	1	1	22.000.000,00	1	70.000.000,00	1	80.000.000,00	2	70.000.000,00	1	65.000.000,00		
	Jumlah Daftar Autentitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan (Arsip)	1	1		1		2		1		1			
2.24.03.2.04.0001 - Penilaian dan Penetapan Autentitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip				7.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		
Terkelolanya Penilaian dan Penetapan Autentitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan (Arsip)	1	1	7.000.000,00	1	50.000.000,00	2	60.000.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00		
2.24.03.2.04.0002 - Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip				15.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		20.000.000,00		
Terkelolanya Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip (Arsip)	1	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	2	25.000.000,00	1	20.000.000,00		
2.24.03.2.05 - Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang				54.000.000,00		75.000.000,00		95.000.000,00		77.000.000,00		67.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Daftar arsip statis yang ditemukan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang (Arsip)			54.000.000,00		75.000.000,00		95.000.000,00		77.000.000,00		67.000.000,00		
	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan (Arsip)	1	1		1		2		2		1			
	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman (Arsip)	1	1		1		2		1		2			
2.24.03.2.05.0001 - Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang				25.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan (Arsip)	1	1	25.000.000,00	1	40.000.000,00	2	45.000.000,00	2	45.000.000,00	1	30.000.000,00		
2.24.03.2.05.0002 - Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang				20.000.000,00		20.000.000,00		30.000.000,00		17.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang (Arsip)			20.000.000,00		20.000.000,00		30.000.000,00		17.000.000,00		25.000.000,00		
2.24.03.2.05.0003 - Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)				9.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		15.000.000,00		12.000.000,00		
Terlaksananya Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman (Arsip)	1	1	9.000.000,00	1	15.000.000,00	2	20.000.000,00	1	15.000.000,00	2	12.000.000,00		
2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP				16.500.000,00		29.000.000,00		27.000.000,00		40.000.000,00		35.000.000,00		
Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Persentase)	13,33	13,33	16.500.000,00	13,33	29.000.000,00	13,33	27.000.000,00	13,33	40.000.000,00	13,33	35.000.000,00	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.24.04.2.01 - Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota				16.500.000,00		29.000.000,00		27.000.000,00		40.000.000,00		35.000.000,00		
Tersedianya SOP Arsip yang Bersifat Tertutup yang Digunakan Perangkat Daerah	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan (SOP)	8	4	16.500.000,00	3	29.000.000,00	3	27.000.000,00	4	40.000.000,00	4	35.000.000,00		
	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Arsip)	8	1		1		1		1		1			
2.24.04.2.01.0003 - Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup				9.000.000,00		20.000.000,00		12.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan (SOP)	8	4	9.000.000,00	3	20.000.000,00	3	12.000.000,00	4	15.000.000,00	4	15.000.000,00		
2.24.04.2.01.0004 - Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup				7.500.000,00		9.000.000,00		15.000.000,00		25.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Arsip)	8	1	7.500.000,00	1	9.000.000,00	1	15.000.000,00	1	25.000.000,00	1	20.000.000,00		

Tabel 4.1c Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
<b>2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>				
1.	2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Perangkat Daerah	2.23.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			2.23.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			2.23.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
			2.23.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
			2.23.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			2.23.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			2.23.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			2.23.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			2.23.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
			2.23.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			2.23.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
			2.23.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
			2.23.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			2.23.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
			2.23.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			2.23.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			2.23.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
			2.23.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
			2.23.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
			2.23.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
			2.23.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			2.23.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
			2.23.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
			2.23.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			2.23.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			2.23.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			2.23.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			2.23.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			2.23.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			2.23.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			2.23.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			2.23.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			2.23.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			2.23.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			2.23.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			2.23.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			2.23.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			2.23.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			2.23.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			2.23.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2.	2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	2.23.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.23.02.2.01.0004 - Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	
			2.23.02.2.01.0011 - Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			2.23.02.2.01.0013 - Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	
			2.23.02.2.01.0016 - Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.23.02.2.01.0017 - Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	
			2.23.02.2.01.0018 - Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	
			2.23.02.2.01.0019 - Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	
			2.23.02.2.01.0020 - Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	
			2.23.02.2.02 - Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.23.02.2.02.0006 - Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.23.02.2.02.0007 - Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	
			2.23.02.2.02.0009 - Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	
			2.23.02.2.02.0010 - Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	
3.	2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	2.23.03.2.01 - Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	
			2.23.03.2.01.0003 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	
			2.23.03.2.02 - Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.23.03.2.02.0003 - Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			2.23.03.2.02.0004 - Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	
4.	2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis	2.24.02.2.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	
			2.24.02.2.01.0001 - Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	
			2.24.02.2.01.0002 - Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	
			2.24.02.2.01.0003 - Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.24.02.2.02 - Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	
			2.24.02.2.02.0001 - Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	
			2.24.02.2.02.0004 - Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	
			2.24.02.2.03 - Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	
			2.24.02.2.03.0001 - Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	
			2.24.02.2.03.0002 - Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	
5.	2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Sesuai NSPK	2.24.03.2.01 - Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	
			2.24.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	
			2.24.03.2.01.0004 - Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			2.24.03.2.03 - Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	
			2.24.03.2.03.0001 - Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.24.03.2.03.0002 - Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.24.03.2.03.0003 - Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	
			2.24.03.2.03.0004 - Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	
			2.24.03.2.04 - Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	
			2.24.03.2.04.0001 - Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	
			2.24.03.2.04.0002 - Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	
			2.24.03.2.05 - Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	
			2.24.03.2.05.0001 - Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	
			2.24.03.2.05.0002 - Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	
			2.24.03.2.05.0003 - Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	
6.	2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Penggunaan	2.24.04.2.01 - Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	

<b>NO</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>
		Arsip yang Bersifat Tertutup		
			2.24.04.2.01.0003 - Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	
			2.24.04.2.01.0004 - Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	

## 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja perangkat daerah secara rinci dapat dikemukakan pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.2a**  
**Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN									
2.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	40	41	42	43	44	45	46	
3.	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	45	50	55	58	60	65	66	
4.	Tingkat Kegemaran Membaca	Nilai	47,11	49,29	50,30	51,35	52,40	53,45	54,50	
5.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	54,45	56	58	60	62	65	68	
6.	Tingkat Ketersediaan Arsip	Persentase	75	75	75	75,50	75,50	80	80	

**Tabel 4.2b**  
**Indikator Kinerja Kunci**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN										
2.	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	positif	Persentase	69,70	71,21	72,73	74,24	75,76	77,27	78,79	
3.	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran		%	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	positif	Nilai	47,11	49,29	50,30	51,35	52,40	53,45	54,50	
5.	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN										

6.	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip		%	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	
7.	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup		Persentase	13,33	13,33	13,33	13,33	13,33	13,33	13,33	
8.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola Arsip secara baku		%	100	75	80	90	100	100	100	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025 - 2029 ini merupakan penjabaran dari Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Seruyan periode tahun 2025 - 2029, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan urusan perpustakaan dan urusan kearsipan yang menjadi tanggungjawab Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 - 2029. Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai acuan kebijakan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah. Dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program-program dalam dokumen RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 yang termuat dalam dokumen Renstra ini, sangat diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Perangkat Daerah sehingga dapat diimplementasikan serta terlaksana dengan baik.

Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 menjadi pedoman perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah tahun 2025-2029. Semoga dengan tersusunnya dokumen ini sasaran pembangunan Kabupaten Seruyan menjadi tercapai dan berhasil dengan baik.